

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* atau Teori Keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota yang ada di dalam perusahaan yakni antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik disuatu perusahaan. Sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan mandat oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaan nya. Teori keagenan ini memiliki tujuan, yaitu menyelesaikan masalah agensi yang muncul ketika timbulnya konflik tujuan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen serta kesulitan pemilik perusahaan melakukan verifikasi pekerjaan manajemen. Kemudian, menyelesaikan masalah pembagian resiko yang muncul saat pemilik perusahaan dan pihak manajemen memiliki perilaku yang berbeda terhadap resiko (Lubis, 2019).

Berdasarkan teori agensi yang telah dijelaskan sebelum nya, dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana pemerintah bertindak sebagai agen (*agent*), sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik (*principal*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang (mandat) yang telah diberikan kepadanya. Laporan keuangan tersebut, nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan serta dapat juga digunakan untuk melihat kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah selama suatu periode. Selain itu, melalui laporan keuangan masyarakat juga bisa melakukan evaluasi kinerja dari pemerintah apakah pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi nya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah membuat laporan keuangan sebaik-baiknya agar

tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat atas wewenang yang telah diberikan kepada mereka. Apabila, pemerintah melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien maka laporan keuangan yang dihasilkan pun akan berkualitas. Hal tersebut dapat meningkatkan nama baik pemerintahan di masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam teori ini terdapat kemungkinan terjadinya konflik antara agen dengan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan. Dengan adanya teori ini, dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara agen dengan pemilik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya akuntabilitas dari pihak agen untuk meyakinkan *principal* (publik) bahwa wewenang yang diberikan telah dijalankan semaksimal mungkin (Nengsy & Sarimaulina, 2019).

## **2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Selain itu, secara spesifik tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah ialah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada nya, dengan :

1. Menyajikan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyajikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

3. Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyajikan informasi tentang ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyajikan informasi tentang cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyajikan informasi tentang potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyajikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan operasional (LO)
5. Laporan arus kas (LAK)
6. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
7. Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga bisa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya. Apabila karakteristik kualitatif laporan keuangan telah terpenuhi, maka laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan pun akan berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari 4 syarat yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terdapat di dalamnya bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna dengan membantu mereka melakukan evaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang relevan bisa dikaitkan dengan maksud penggunaannya.

## 2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari makna atau pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyediakan setiap fakta dengan jujur serta bisa diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak bisa diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial bisa menyesatkan.

## 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan yang dilakukan secara internal bisa dilakukan jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan yang dilakukan secara eksternal, bisa dilakukan jika entitas yang diperbandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang digunakan, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada saat periode terjadinya perubahan.

## 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan yang cukup atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya keinginan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan telah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada layanan publik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, menjadi dorongan bagi setiap pemerintah daerah untuk ikut serta dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet atau jaringan intranet sehingga dapat mempermudah pengelolaan keuangan dan menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Roshanti et al., 2014).

Teknologi informasi itu sendiri merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi (Kadir & Triwahyuni, 2013). Dengan adanya penggabungan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi, maka terciptalah suatu teknologi informasi. Selain itu, teknologi informasi juga dapat diartikan sebagai teknologi yang memiliki kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, serta menampilkan dan menyebarkan informasi (Darwanis & Mahyani, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan sistem informasi sehingga peranannya yang cukup harus didukung dengan adanya perangkat komputer baik hardware atau software yang dapat menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas dengan penerapan standar khusus. Teknologi informasi terdiri dari komputer

(*main frame*), perangkat lunak (*software*), data base, jaringan (*internet atau intranet*), *electronic commerce (e-commerce)* dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan teknologi. Salah satu komponen teknologi informasi ialah komputer. Dimana komputer bisa diartikan sebagai alat yang dapat melipatgandakan keahlian yang dimiliki oleh manusia, dan juga dapat melakukan sesuatu yang manusia sendiri tidak mungkin mampu melakukannya (Putri, 2017). Oleh karena itu, pada umumnya pemerintah menggunakan teknologi informasi berupa komputer dan jaringan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **2.4 Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian internal merupakan bagian dari setiap sistem yang digunakan untuk prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian internal adalah kumpulan dari pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya (Safiri & Zulkarnain, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan memaparkan bahwa sistem pengendalian *intern* merupakan proses yang integral terhadap suatu kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai wajib menciptakan serta memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern serta manajemen yang sehat.

## 2. Penilaian resiko

Pengendalian internal wajib memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar atau dari dalam.

## 3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan dari pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus efektif dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

## 4. Informasi dan akuntansi

Informasi wajib di catat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

## 5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit serta reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya pengendalian internal kegiatan ataupun aktivitas yang akan dilakukan pemerintah akan menjadi lebih teratur serta membuat kondisi lingkungan di tempat kerja menjadi lebih nyaman. Menurut Mardi (2014) sesuai dengan definisi AICPA pengendalian internal memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga harta kekayaan milik instansi
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisien operasional
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

## 2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan suatu organisasi (Darwanis & Mahyani, 2009). Sedangkan sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya manusia dalam suatu perusahaan maka sumber daya perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba atau meningkatkan nilai nya sendiri (Nengsy & Sarimaulina, 2019). Pada umumnya, sumber daya manusia memiliki tugas dan fungsi mereka masing-masing di dalam suatu organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas nya merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan nya untuk mencapai tujuan nya secara efektif dan efisien (Rahayu et al., 2014). Apabila sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi, maka tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia nya saja, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya (Wati et al., 2014). Hutapea & Thoha (2008) menyatakan bahwa terdapat 3 komponen utama dalam pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh masing-masing individu.

### 1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dipunyai oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi yang dipunyai oleh seorang pegawai bisa dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dipunyai oleh seorang pegawai. Oleh karena itu, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup baik akan lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.



## 2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, contohnya : keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu ataupun kelompok. Dalam melaksanakan tugasnya, selain mempunyai pengetahuan yang cukup pegawai juga harus mempunyai keterampilan khusus. Keterampilan ini dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu, dikarenakan keterampilan ini dibutuhkan pada saat berkomunikasi, memotivasi orang lain ataupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah serta mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau instansi.

## 3. Perilaku/Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah pola tingkah laku seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Pegawai diharapkan mempunyai sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi dalam perusahaan. Jika pegawai telah mempunyai sikap tersebut, maka secara otomatis semua tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pegawai akan merasa mempunyai tanggung jawab penuh atas tugas yang telah diberikan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**

### **Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Kadek	Pengaruh	Dependen :	1. Kompetensi

	Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Independen : 1. Kompetensi SDM 2. Penerapan SAP 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 2. Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 4. Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
2	Liza Rahayu, Kennedy,	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya	Dependen : Kualitas Laporan	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

	Yuneita Anisma (2014)	Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Keuangan Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekan Baru 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekan Baru 3. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekan Baru
3	Khoirina Kencana Ningrum (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Pemanfaatan

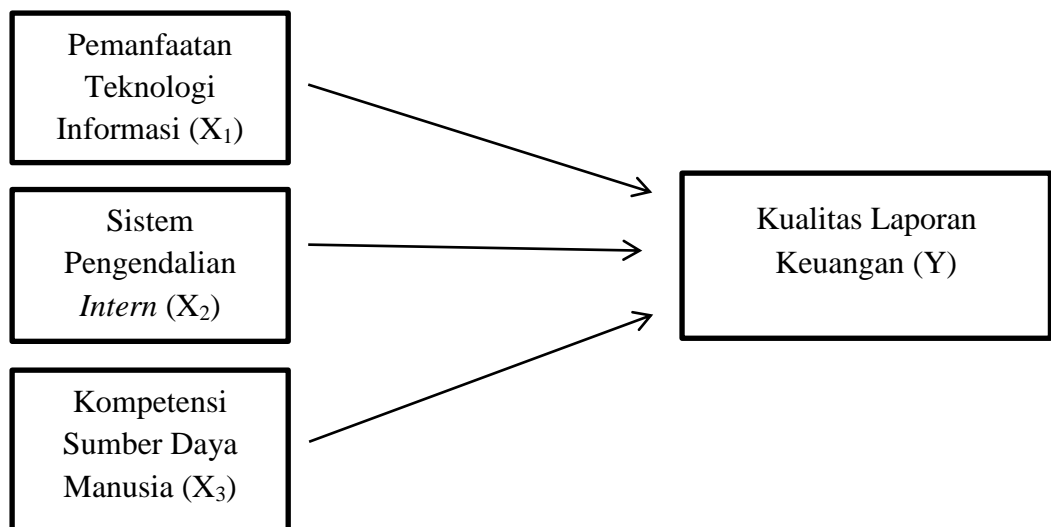
		Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Sistem Pengendalian Intern	Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4	Heni Sundari, Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Di Kota Bandung 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Di Kota Bandung 3. Sistem Pengendalian <i>Intern</i> berpengaruh secara

		Tahun 2018)		signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Kota Bandung
5	Shintami Oktavia, Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Komitmen Organisasi 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 3. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif

				terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
6	Diana Puspita, Fadli, Halimatus yadiah (2020)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 4. Sistem Pengendalian Internal	1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 4. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
7	Herman Darwis, Meliana (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen :	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

		Pengendalian <i>Intern</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	2. Sistem Pengendalian <i>Intern</i> berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
--	--	--	--	---

## 2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.

### Kerangka Pemikiran

## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu hal yang paling penting dalam penyusunan laporan keuangan (Puspita et al., 2020). Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi

bisnis saja, tetapi juga pada organisasi sektor publik termasuk pemerintah (Safiri & Zulkarnain, 2021). Teknologi informasi terdiri dari komputer (*main frame*), perangkat lunak (*software*), data base, jaringan (*internet atau intranet*), *electronic commerce (e-commerce)* dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan teknologi (Putri, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada layanan publik.

Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi (Kadir & Triwahyuni, 2013). Dalam proses penyusunan laporan keuangan wajib di dukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga dapat membantu aparatur pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih efektif, efisien dan ekonomis (Maysaroh, 2018). Dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang telah terkomputerisasi bisa mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan juga menghemat waktu pengerjaan (Sundari & Rahayu, 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi tingkat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja (Wardani & Andriyani, 2017). Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena ketidaksamaan format dari laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan atas penyajian laporan keuangan menjadi lebih tinggi (Susanti, 2017). Oleh karena itu, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin tinggi (Nurillah & Muid, 2014).



Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Herman Darwis & Meliana (2020) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **2.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan memaparkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral terhadap suatu kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga di dukung oleh Safiri & Zulkarnain (2021) bahwa sistem pengendalian internal dirancang untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan. Selain itu, sistem pengendalian internal ini juga bisa dipergunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyajikan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan dan menjamin dipatuhinya hukum serta peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan penerapan sistem pengendalian *intern* mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari seberapa baik nya pengendalian internal yang telah diterapkan. Apabila pengendalian internal lemah, maka akan sulit untuk mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga bisa menyebabkan bukti audit yang didapat dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan (Herawati, 2014).

Sistem pengendalian internal juga berguna untuk memberikan keyakinan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan (Herawati, 2014). Selain itu, pengendalian *intern* juga diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi dan bisa memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem (Desipradani & Nuraini, 2018). Oleh karena itu, menurut Sundari & Rahayu (2019) menyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian *intern* maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Diana Puspita, Fadli, Halimatusyadiah (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem Pengendalian *Intern* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **2.8.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber daya manusia merupakan elemen yang penting untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Wati et al., 2014). Sedangkan kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas nya merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangan nya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Rahayu et al., 2014). Menurut Mardiasmo (2002) sumber daya manusia telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun bisa diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan bisa memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Sundari & Rahayu, 2019). Oleh karena itu, suatu pemerintahan tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten untuk memperoleh laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas (Maysaroh, 2018).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Heni Sundari & Sri Rahayu (2019) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan